BAB I
PENDAHULUAN

Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu pintu gerbang pembangunan di Wilayah Indonesia Bagian Timur dan secara geografis Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari luas wilayah daratan 198.653,23 km^2 dan luas pengelolaan laut 29.461,42 km^2, terletak antara $113^0$44' dan $119^0$00' Bujur Timur, dan antara $4^0$24' Lintang Utara dan $2^0$25' Lintang Selatan. Dengan adanya perkembangan dan pemekaran wilayah, Kalimantan Timur yang merupakan provinsi terluas kedua setelah papua dibagi menjadi 10 (sepuluh) kabupaten, 4 (empat) kota, 150 kecamatan dan 1.493 desa/kelurahan. Sepuluh Kabupaten tersebut adalah Paser dengan ibukota Tanah Grogot, Kutai Barat dengan ibukota Sendawar, Kutai Kartanegara dengan ibukota Tenggarong, Kutai Timur dengan ibukota Sangatta, Berau dengan ibukota Tanjung Redeb, Malinau dengan ibukota Malinau, Bulungan dengan ibukota Tanjung Selor, Nunukan dengan ibukota Nunukan, Penajam Paser Utara dengan ibukota Penajam, dan Tana Tidung dengan ibukota Tideng Pale. Sedangkan empat kota adalah Balikpapan, Samarinda, Tarakan dan Bontang.

Mengingat letaknya diwilayah khatulistiwa, maka Kalimantan Timur memiliki karakteristik iklim/ cuaca dengan curah hujan turun merata sepanjang tahun, sehingga tidak terdapat perbedaan yang tegas antara musim kemarau dengan musim hujan. Curah hujan tertinggi 401,1 mm per tahun terjadi di Kota Tarakan sedangkan terendah 202,0 mm terdapat di Kota Samarinda (Sumber data : Kalimantan Timur dalam Angka, 2013).

Sub Sektor Perkebunan mempunyai peranan yang strategis dalam pembangunan ekonomi, sosial maupun ekologi di Kalimantan Timur. Peranan tersebut semakin penting dan strategis karena merupakan sub sektor yang berbasis sumber daya alam yang relatif tidak tergantung pada komponen impor. Kegiatan pembangunan perkebunan di Kalimantan Timur dilaksanakan dengan berbagai pola pengembangan seperti pola Perkebunan Besar Swasta (PBS), Pola Perkebunan Besar Negara (PBN) dan Perkebunan Rakyat yang dalam periode 2009 – 2013 telah memberikan hasil cukup menggembirakan yang ditunjukkan dengan semakin meningkatnya produksi. Produksi dan luas areal diperkirakan

terus meningkat seiring dengan tumbuhnya investasi baik dari swadaya murni masyarakat, bantuan pemerintah maupun perusahaan swasta perkebunan (PBS).

Pembangunan sub sektor perkebunan di Kalimantan Timur merupakan bagian pembangunan nasional, berorientasi pada upaya pembangunan ekonomi rakyat dengan penekanan pada peningkatan kesejahteraan rakyat, penanggulangan kemiskinan serta untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri dalam negeri dan sekaligus mendukung peningkatan ekspor yang berbasis bahan baku terbarukan dan ramah lingkungan.

Luas areal mengalami rata–rata pertumbuhan sebesar 12,84 persen setiap tahun, sedangkan produksi sebesar 29,58 persen setiap tahun. Luas areal pada tahun 2009 mencapai 712.167 Ha dan meningkat menjadi 1.145.135 Ha pada tahun 2013 (angka sementara), sedangkan jumlah produksi dari 2.381.411 ton pada tahun 2009 menjadi 6.611.885 pada tahun 2013 (angka estimasi).

Pola Perkebunan Besar Swasta (PBS) mengalami peningkatan luas areal terbesar yakni 391.969,5 ha pada tahun 2009 dan meningkat menjadi 759.966 Ha pada tahun 2013 atau mengalami kenaikan 93,88 persen. Sedangkan pola Perkebunan Rakyat (PR) dari 303.560 (2009) menjadi 366.514 ha pada tahun 2013, atau mengalami peningkatan seluas 62.981 Ha (20,75 persen).

Beberapa Komoditi Unggulan yang mengalami penambahan areal cukup besar meliputi :

- ***Kelapa Sawit*** pada tahun 2009 seluas 530.554 ha meningkat menjadi 1.002.294 ha yang artinya mengalami peningkatan seluas 471.740 ha atau 88,91 persen (angka sementara tahun 2013);
- ***Karet*** mengalami kenaikan luas, dimana pada tahun 2009 seluas 75.925 Ha sedangkan tahun 2013 yang luasnya sebesar 92.041 ha, kenaikan luas areal tersebut dikarenakan terlaksananya program revitalisasi pada komoditi ini (angka estimasi tahun 2013);

Sementara itu, beberapa komoditas perkebunan mengalami penurunan akibat tidak seimbangnya antara peremajaan (penanaman baru) dengan jumlah tanaman yang telah tua dan mati. Selain itu adanya alih fungsi lahan menjadi kelapa sawit, tanaman pangan dan sektor pertambangan juga menjadi penyebab penurunan luas terhadap komoditas tersebut, diantaranya :

- ***Kakao*** pada tahun 2009 tercatat seluas 33.421 Ha menurun menjadi 17.453 Ha pada tahun 2013, atau mengalami penurunan luasan 15.968 ha atau 47,78 persen.
- ***Kelapa Dalam*** pada tahun 2009 tercatat seluas 33.309 Ha dan pada tahun 2013 menjadi 18.727 Ha, atau mengalami penurunan luasan 14.582 ha atau 43,78 persen.
- ***Lada*** pada tahun 2009 tercatat seluas 14.900 hektar dan tahun 2013 seluas 6.466 ha, atau mengalami penurunan luasan 8.434 ha atau 56,60 persen

1. Dasar Hukum

Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu lembaga yang berada dibawah lingkup Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur. Landasan hukum yang mendasari adalah Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur nomor : 04 tahun 2003 Tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 45 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 14 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

2. Gambaran Umum

A. Struktur Organisasi

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Provinsi Kalimantan Timur, maka dibentuklah susunan ***Struktur Organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur*** yang terdiri dari :

- **Susunan Kepegawaian**

Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dalam menjalankan tugas dan fungsinya telah terbentuk susunan kepegawaian sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat :

- Sub Bagian Perencanaan Program
- Sub Bagian Umum
- Sub Bagian Keuangan

c. Bidang- Bidang :

- Bidang Pengembangan
  - Seksi Penyiapan dan Pemanfaatan Lahan
  - Seksi Pengembangan dan Perluasan areal
  - Seksi Penataan Kelembagaan dan SDM Petani
- Bidang Produksi
  - Seksi Bahan Tanaman
  - Seksi Budidaya Tanaman
  - Seksi Teknologi Alat dan Mesin
- Bidang Usaha
  - Seksi Administrasi Perijinan
  - Seksi Pembinaan Usaha
  - Seksi Standarisasi Mutu dan Pemasaran produk

- Bidang Perlindungan
  - Seksi Sarana Perlindungan dan Perkebunan
  - Seksi Sarana Peramalan, Pengamatan, dan Pengendalian. OPT
  - Seksi Konservasi Tanah dan Air

d. UPTD :

- UPTD. Pengawasan Benih Perkebunan (PBP)
  - Seksi Pengujian dan Sertifikasi Benih
  - Seksi Pengawasan dan Peredaran Benih
  - Sub Bagian Tata Usaha
- UPTD. Teknologi Terapan Perkebunan (T2P)
  - Seksi Teknologi Terapan Budidaya Perkebunan
  - Seksi Teknologi Terapan Pengolahan Hasil
  - Sub Bagian Tata Usaha
- UPTD. Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan
  - Seksi Pengembangan Pengendalian Hama dan Gulma
  - Seksi Pengembangan Pengendalian Penyakit
  - Sub Bagian Tata Usaha

Adapun bagan struktur organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana berikut :

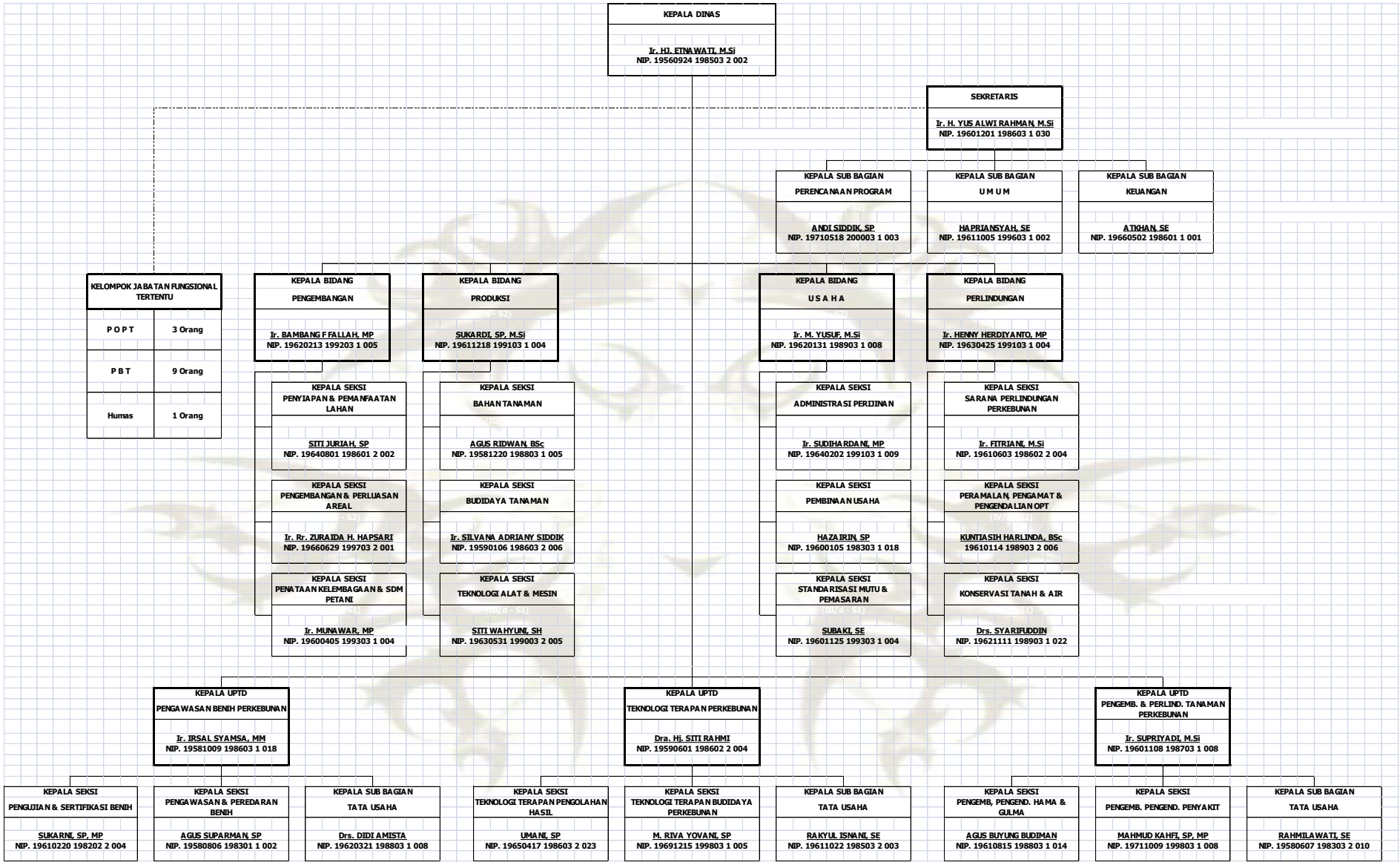
KEPALA DINAS
Ir. HJ. ETNAWATI, M.Si
NIP. 19560924 198503 2 002
SEKRETARIS
Ir. H. YUS ALWI RAHMAN, M.Si
NIP. 19601201 198603 1 030
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM
ANDI SIDDIK, SP
NIP. 19710518 200003 1 003
KEPALA SUB BAGIAN UMUM
HAPRIANSYAH, SE
NIP. 19611005 199603 1 002
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
ATKHAN, SE
NIP. 19660502 198601 1 001
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
POPT 3 Orang
PBT 9 Orang
Humas 1 Orang
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
Ir. BAMBANG FFALLAH, MP
NIP. 19620213 199203 1 005
KEPALA BIDANG PRODUKSI
SUKARDI, SP, M.Si
NIP. 19611218 199103 1 004
KEPALA BIDANG USAHA
Ir. M. YUSUF, M.Si
NIP. 19620131 198903 1 008
KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN
Ir. HENNY HERDIYANTO, MP
NIP. 19630425 199103 1 004
KEPALA SEKSI PENYIAPAN & PEMANFAATAN LAHAN
SITI JURIAH, SP
NIP. 19640801 198601 2 002
KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN & PERLUASAN AREAL
Ir. Rr. ZURAIDA H. HAPSARI
NIP. 19660629 199703 2 001
KEPALA SEKSI PENATAAN KELEMBAGAAN & SDM PETANI
Ir. MUNAWAR, MP
NIP. 19600405 199303 1 004
KEPALA SEKSI BAHAN TANAMAN
AGUS RIDWAN, BSc
NIP. 19581220 198803 1 005
KEPALA SEKSI BUDIDAYA TANAMAN
Ir. SILVANA ADRIANY SIDDIK
NIP. 19590106 198603 2 006
KEPALA SEKSI TEKNOLOGI ALAT & MESIN
SITI WAHYUNI, SH
NIP. 19630531 199003 2 005
KEPALA SEKSI ADMINISTRASI PERIJINAN
Ir. SUDIHARDANI, MP
NIP. 19640202 199103 1 009
KEPALA SEKSI PEMBINAAN USAHA
HAZAIRIN, SP
NIP. 19600105 198303 1 018
KEPALA SEKSI STANDARISASI MUTU & PEMASARAN
SUBAKI, SE
NIP. 19601125 199303 1 004
KEPALA SEKSI SARANA PERLINDUNGAN PERKEBUNAN
Ir. FITRIANI, M.Si
NIP. 19610603 198602 2 004
KEPALA SEKSI PERAMALAN, PENGAMAT & PENGENDALIAN OPT
KUNTIASIH HARLINDA, BSc
19610114 198903 2 006
KEPALA SEKSI KONSERVASI TANAH & AIR
Drs. SYARIFUDDIN
NIP. 19621111 198903 1 022
KEPALA UPTD PENGAWASAN BENIH PERKEBUNAN
Ir. IRSAL SYAMSA, MM
NIP. 19581009 198603 1 018
KEPALA UPTD TEKNOLOGI TERAPAN PERKEBUNAN
Dra. Hj. SITI RAHMI
NIP. 19590601 198602 2 004
KEPALA UPTD PENGEMB. & PERLIND. TANAMAN PERKEBUNAN
Ir. SUPRIYADI, M.Si
NIP. 19601108 198703 1 008
KEPALA SEKSI PENGUJIAN & SERTIFIKASI BENIH
SUKARNI, SP, MP
NIP. 19610220 198202 2 004
KEPALA SEKSI PENGAWASAN & PEREDARAN BENIH
AGUS SUPARMAN, SP
NIP. 19580806 198301 1 002
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
Drs. DIDI AMISTA
NIP. 19620321 198803 1 008
KEPALA SEKSI TEKNOLOGI TERAPAN PENGOLAHAN HASIL
UMANI, SP
NIP. 19650417 198603 2 023
KEPALA SEKSI TEKNOLOGI TERAPAN BUDIDAYA PERKEBUNAN
M. RIVA YOVANI, SP
NIP. 19691215 199803 1 005
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
RAKYUL ISNANI, SE
NIP. 19611022 198503 2 003
KEPALA SEKSI PENGEMB, PENGEND. HAMA & GULMA
AGUS BUYUNG BUDIMAN
NIP. 19610815 198803 1 014
KEPALA SEKSI PENGEMB. PENGEND. PENYAKIT
MAHMUD KAHFI, SP, MP
NIP. 19711009 199803 1 008
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
RAHMILAWATI, SE
NIP. 19580607 198303 2 010

B. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan,Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Jumlah pegawai berdasarkan status pegawai sampai dengan tahun anggaran 2013 di lingkup Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 117 (Seratus Tujuh Belas) orang, dimana 115 (Seratus Lima Belas) orang merupakan pegawai aktif, 1 (satu) orang tidak aktif (meninggal dunia) dan 1 (satu) orang merupakan pegawai titipan, dengan komposisi kepegawaian sesuai tabel berikut ini :

a) Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan dan Gender

Jumlah pegawai Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan golongan dan gender adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Jumlah pegawai berdasarkan Golongan dan Gender

Gender	Golongan				Jumlah
	IV	III	II	I	
Pria	12	36	17	3	68
Wanita	6	31	12	0	49
	18	67	29	3	117

b) Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Eselon dan Gender

Jumlah pegawai Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan eselon dan gender adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Jumlah pegawai berdasarkan eselon dan gender

Gender	Eselon					Non Eselon	Jumlah
	I	II	III	IV	V		
Pria	0	0	7	14	0	47	68
Wanita	0	1	1	11	0	36	49
	0	1	8	25	0	82	117

c) Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Gender

Pegawai Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan tingkat pendidikan dan gender adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dan gender

Gender	Pendidikan											Jumlah
	S3	S2	S1	D.IV	SM	D.III	D.II	D.I	SLTA	SLTP	SD	
Pria	1	12	25	0	0	2	0	2	23	3	0	68
Wanita	0	3	27	0	0	2	0	0	17	0	0	49
	1	15	52	0	0	4	0	2	39	3	0	117

d) Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan DIKLATPIM dan Gender

Pegawai Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan DIKLATPIM dan gender adalah sebagai berikut :

Tabel 4. Jumlah pegawai berdasarkan DIKLATPIM dan gender

Gender	DIKLATPIM				Jumlah
	TK. I	TK. II	TK. III	TK. IV	
Pria	1	0	11	16	28
Wanita	0	1	5	7	13
	1	1	16	23	41

e) Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jabatan Fungsional Tertentu dan Gender

Pegawai Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Jabatan Fungsional Tertentu dan gender adalah sebagai berikut :

Tabel 5. Jumlah pegawai berdasarkan Jabatan Fungsional Tertentu dan gender

Gender	JAPUNG Golongan				Jumlah
	IV	III	II	I	
Pria	2	5	3	0	10
Wanita	0	3	0	0	3
	2	8	3	0	13

C. Standar Operasional Prosedur

Standar Operasional Prosedur adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik telah menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan yang bersifat teknis dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur. Adapun Standar Pelayanannya sebagai berikut :

1. Standar Pelayanan Publik Pemberian Advis Teknis Perijinan Usaha Perkebunan

   Dalam rangka melaksanakan kegiatan fasilitasi Rekomendasi atau Izin Usaha Perkebunan yang akan diterbitkan Gubernur, maka Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur memperoleh tugas untuk memberikan advis teknis atas permohonan usaha perkebunan milik koperasi maupun perseroan terbatas. Oleh karenanya, guna membantu kelancaran dalam pemberian advis teknis perkebunan di wilayah Kalimantan Timur, maka diatur dalam keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur nomor : 188.4/001Kpts-Disbun/I/2010 tanggal 25 Januari 2010. Adapun standarnya terdiri dari :

- Advis teknis terhadap ijin usaha perkebunan (IUP-B dan P)
- Advis teknis ijin usaha perkebunan untuk budidaya (IUP-B)
- Advis teknis ijin usaha perkebunan untuk pengolahan (IUP-P)

2. Standar Pelayanan Publik Bidang Produksi

   Untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik Bidang Produksi pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur maka diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 188.4/007/Kpts-Disbun/I/2011 tanggal 31 Januari 2011 tentang Standar Pelayanan Publik Bidang Produksi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, yang didalamnya memuat tentang :

   - Pemberian Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit (SP2B-KS)
   - Pemberian Surat Rekomendasi Import Benih

3. Standar Pelayanan Publik Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan

   Sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik maka perlu adanya Standar Pelayanan Publik Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan yang menjadi acuan oleh Petugas / Pegawai ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur nomor : 188.4/153/Kpts-Disbun/I/2010 tanggal 8 Juni 2010 yang meliputi :

   - Identifikasi Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT)
   - Rekomendasi Pengendalian Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT)
   - Penanggulangan Eksplosi Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT)
   - Diklat Pengendalian Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT)
   - Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah

4. Standar Pelayanan Publik Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengawasan Benih Perkebunan, Pengawasan Peredaran Benih, Pemeriksaan/Pengujian Benih Perkebunan, Pemeriksaan/Pengujian Bibit Perkebunan

Dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat perlu adanya standar baku yang dapat memberikan jaminan dan kepastian pelayanan yang dapat memudahkan dan memberi kepuasan bagi pihak yang dilayani maupun yang melayani ditetapkan oleh Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 188.4/154/Kpts-Disbun/VI/2010 tanggal 8 Juni 2010. Adapun layanan utama dari Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengawasan Benih Perkebunan meliputi :

- Sertifikasi Kebun Induk
- Seleksi Pohon Induk
- Sertifikasi Kebun Entres
- Sertifikasi Kebun Penangkaran
- Sertifikasi Bibit
- Pengujian Mutu Benih

5. Standar Pelayanan Publik Pendayagunaan Website Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Sebagai Sarana Penyampaian Data dan Informasi Berbasis Web

   Ditetapkannya Standar Pelayanan Publik ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik data informasi dan pendayagunaan website di lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan untuk mewujudkan system penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal.

6. Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

   Sebagai upaya mendorong peningkatan kualitas sistem monitoring, evaluasi dan pelaporan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, maka ditetapkan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dengan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 188.4/192/Kpts-Disbun/2012 tanggal 4 Juni 2012.

D. Visi Misi

Visi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur adalah :

"Terwujudnya perkebunan berdaya saing, berkerakyatan dan berkelanjutan menuju masyarakat yang sejahtera"

Misi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur adalah :

1. Mendorong berkembangnya usaha perkebunan yang efisien, produktif dan mampu memberikan jaminan kehidupan masyarakat yang lebih baik.
2. Menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan perkebunan.
3. Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya lahan dan kebun secara profesional dan lestari.
4. Meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia.

Dari jabaran Visi dan Misi diatas dapat diperoleh gambaran kebijakan pembangunan sub sektor Perkebunan yaitu :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan struktur ekonomi secara seimbang antara sektor-sektor ekonomi yang padat modal (capital Intensif) dan sektor ekonomi yang padat kerja (labour intensif) dengan memacu sektor-sektor ekonomi yang potensial.
2. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang baru yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah disesuaikan dengan keunggulan komparatif daerah.
3. Membangun sektor perkebunan yang tangguh dengan mengembangkan keunggulan komparatif (comparative advantages) dan keunggulan kompetitif (competitif advantages) yang berbasis agroindustri.

4. Mengembangkan sektor industri kecil dan menengah yang dapat menghasilkan barang setengah jadi sebagai upaya untuk mendorong berkembangnya industri hulu hilir melalui cara-cara :
   a. peningkatan sistem pemasaran hasil produksi perkebunan;
   b. penerapan teknologi pengolahan hasil produk perkebunan;
   c. pemberdayaan penyuluh lapangan.

E. Strategi dan Arah Kebijakan

Kebijakan pembangunan perkebunan diarahkan pada upaya untuk menggerakkan dan memfasilitasi peningkatan produksi dan pengembangan produk perkebunan yang berorientasi pada pasar melalui peningkatan daya kreasi, inovasi dan partisipasi masyarakat melalui :

1. Pengembangan perkebunan yang berpotensi dan bernilai ekonomis tinggi
   - Pemanfaatan lahan-lahan tidur untuk diubah sebagai pengembangan yang produktif guna terwujudnya lahan perkebunan 1 juta hektar kelapa sawit.
   - Pengembangan sentra industri baru pada sektor perkebunan yang potensial sebagai kutub pertumbuhan daerah sekitarnya.
2. Peningkatan mutu dan kualitas serta pemasaran hasil produksi perkebunan untuk meningkatkan kesejahteraan petani
   - Peningkatan kualitas dan profesionalisme sumberdaya manusia pada bidang perkebunan yang didukung dengan tingkat pendidikan yang memadai terutama padi sektor pendidikan yang berbasis spesifikasi keahlian (kejuruan).
   - Peningkatan penggunaan teknologi budidaya dan tepat guna pada pengelolaan perkebunan.
   - Peningkatan pengelolaan komoditas perkebunan potensial melalui diversifikasi pengolahan hasil produksi (agroindustri terkait).
   - Peningkatan pemasaran hasil produksi perkebunan.